

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa saat ini merupakan poros kemandirian yang dapat membuat perekonomian disuatu bangsa itu dapat dikatakan baik. Dengan adanya kemajuan ekonomi yang terjadi di pedesaan yang kuat dapat berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang luas. Pembangunan desa merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program namun hal itu belum banyak membuahkan hasil yang memuaskan.²

Di dalam suatu pembangunan yang menjadi titik berat yaitu terletak pada bidang ekonomi, karena ekonomi merupakan penggerak utama dalam pembangunan. Seperti yang diketahui bahwa 70 % dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan.³ Pembangunan sendiri merupakan usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan desa dan kota. Pembangunan pedesaan dapat juga dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara

² Robiatul Adawiyah, "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo), Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 6, Nomor 3, September–Desember 2018

³ Khairul Amri, Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 3, Juli 2015: 295-299.

berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan.⁴

Indonesia merupakan negara yang masih berkembang sehingga, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan pada hakikatnya memiliki tujuan untuk menuju kemandirian dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan didasarkan pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Titik berat pembangunan nasional berada pada bidang ekonomi, bidang ekonomi menjadi penggerak utama pembangunan dengan diiringi oleh kualitas sumberdaya manusia yang memadai. Melihat titik tolak pembangunan nasional yang berada dibidang ekonomi tersebut maka pemerintah dengan rakyat memiliki kewajiban untuk terus menggali, mengelola dan membina potensi yang dimiliki seperti mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah daerah dibreikan kewenangan penuh untuk mengurus dan mengelola sendiri kepentingan rumah tangga nya. Kewenangan tersebut

⁴ M.J Kasiyanto, *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1994), hal. 55

didasarkan pada otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.⁵

Revormasi dan otonomi daerah adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa dalam upaya membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, menjadi suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa sesuai dengan sumber daya yang dimiliki baik berupa sumber daya alam ataupun yang berupa sumber daya manusia. Pemerintah desa dalam menjalankan otonomi, harus melibatkan peran serta masyarakat untuk turut terlibat langsung dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan karena pemerintah desa berhadapan langsung dengan masyarakat. Desa adalah bagian paling depan atau agen pemerintah yang berkenaan langsung dengan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan otonomi desa dan mendorong perekonomian diperdesaan tersebut, maka salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu dengan membentuk suatu BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) melalui pengembangan potensi desa dan partisipasi masyarakat. Dengan pengelolaan BUMDes, maka akan mendorong kuatnya ekonomi desa dan menciptakan kemandirian perekonomian desa. Tujuan didirikannya BUMDes yaitu, tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁵Aprianus Jepri, *Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Bumdes Program Pasar Desa*, Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu politik, Vol. 8 No. 4 (2019)

BUMDes dibentuk dan dibangun oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat. BUMDes lahir sebagai bentuk pendekatan antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam upaya untuk peningkatan ekonomi desa yang berdasarkan pada pengolaan potensi desa. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes oleh pemerintah desa didasari atas otonomi daerah dengan yaitu adanya Peraturan desa dan berpedoman pada Peraturan Daerah. BUMDes pada operasionalnya menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola dengan profesional oleh pengurusnya. Pendirian dan pembentukan BUMDes dilaksanakan melalui musyawarah desa yaitu dengan melihat kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Melalui musyawarah desa, maka BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat dan dapat menampung aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes disasari pada prinsip kooperatif partisipatif dan transparansi. Prinsip pengelolaan BUMDes dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat desa sehingga BUMDes pada operasionalnya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan). Jika lembaga ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan distribusi aset kepada masyarakat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi dipedesaan. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi dipedesaan.

Badan Usaha Milik Desa yang ideal mampu menjadi poros kehidupan masyarakat Desa, Karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi.

Posisi Badan Usaha Milik Desa dalam menghadapi realitas desakan arus intervensi modal domestik dan asing yang kini menjadikan desa sebagai sasaran pengembangan usaha sangat keras sekali, disamping itu Badan Usaha Milik Desa ini hanya bermodal tak seberapa jika dibandingkan dengan swasta yang selalu bermodal besar. Dengan sumber daya alam yang dimiliki desa, hal ini sangat rawan sekali terjadi intervensi modal dan pasar di pedesaan. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa sendiri akan menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan nasional. Diharapkan Badan Usaha Milik Desa ini mampu menggerakkan dinamika ekonomi desa, dan sebagai perusahaan milik desa.⁶

Pengembangan organisasi sangatlah diperlukan dalam suatu organisasi. Karena, di zaman modern ini organisasi harus mampu mempertahankan eksistensinya dan mampu bersaing dengan organisasi-organisasi yang lain. Organisasi itu dikatakan berhasil apabila organisasi tersebut mampu mengikuti

⁶ Robiatul Adawiyah, Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo), Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 6, Nomor 3, September – Desember 2018

perkembangan saat ini dan tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai. Ada 2 Faktor penyebab dilakukannya pengembangan organisasi yaitu: kekuatan eksternal dan kekuatan internal. Kekuatan eksternal meliputi: kompetisi yang semakin tajam antar organisasi, perkembangan IPTEK, perubahan lingkungan (baik lingkungan fisik maupun sosial). Sedangkan, pada kekuatan internal meliputi: struktur, sistem dan prosedur, perlengkapan dan fasilitas, proses dan sasaran.⁷

Ada dua alasan mengapa pengembangan organisasi sangatlah diperlukan dalam suatu organisasi. Alasan yang pertama yaitu: struktur imbalan dalam pekerjaan tidak cukup memperkuat pelatihan konvensional, sehingga seringkali gagal mengalihkan hasil belajar dalam pekerjaan. Terlalu banyak program yang dirancang dengan baik akan tetapi mengalami kegagalan karena faktor lingkungan kerja yang tidak mendukung. Sedangkan alasan yang kedua yaitu: laju perubahan yang berlangsung dengan cepat, yang mengharuskan organisasi untuk benar-benar luwes dalam rangka melaksanakan hidupnya dan untuk memperoleh keuntungan.

Pengembangan organisasi berupaya untuk mengembangkan organisasi secara keseluruhan agar dapat menanggapi perubahan secara lebih seragam dan berkemampuan. Pengembangan ekonomi di pedesaan sudah dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan. Akan tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal sebagaimana yang dicita-citakan selama ini. Salah satu factor yang mendominasi adalah intervensi dari

⁷ Taliziduhu Naraha, *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hal.16

pemerintah yang terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian masyarakat desa.

Desa Margourip merupakan desa yang ada di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri yang banyak memiliki potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat. Dengan hasil peternakan yang baik dan telah memiliki BUMDes didalamnya, Badan Usaha Milik Desa Margourip ini diberi nama Badan Usaha Milik Desa Margo Jaya, dinamakan tersebut itu diharapkan agar Desa Margourip bisa jaya selamanya. BUMDes Margo Jaya didirikan pada tahun 2016 dan sudah beroperasi selama 5 tahun. Dari hasil survey pengamatan penelitian tentang BUMDes di Desa Margourip ini menjalankan beberapa jenis unit usaha untuk menambah kas atau pendapatan desa, yaitu :

1. Unit usaha PAMSIMAS
2. Unit usaha persewaan ruko
3. Unit usaha budidaya penggemukan sapi potong
4. Unit usaha produksi UMKM
5. Unit keagenan BNI 46

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Lebih lanjut sebagai salah satu lembaga ekonomi yang

beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Percepatan pembangunan disegala bidang struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Bagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 tentang pengembangan masyarakat Islam :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١١﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak meroboh keadaan sesuatu kaum sehingga mereka meroboh keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*”.⁸

Walaupun desa telah memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dan pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal maka didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 3*, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), hal. 41

Pemerintah desa telah membuat BUMDes Margojoyo yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan sebenarnya sudah ada sejak Nabi Muhammad Saw serta dijadikan sebagai tujuan Nabi pada waktu itu untuk mensejahterakan kaumnya, seperti yang dikatakan di dalam Al-Qur'an surat Anbiya' 21 ayat 107 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus melainkan untuk/menjadi rahmat bagi alam semesta”.⁹

Kegiatan ekonomi sudah menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan dan juga kemakmuran. Nabi Muhammad Saw dalam menjalankan atau menerapkan ekonomi islam sesuai dengan ketentuan yang berasal dari Al-Qu'ran dan juga As-sunnah dengan bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kemiskinan dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Margo Jaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)**”.

⁹ Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economies*, (Jakarta:Bumi Aksara,2009),hal. 115

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat memaparkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengembangan BUMDes Margo Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Margourip ?
2. Apa kendala dan solusi yang dihadapi BUMDes Margo Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Margourip ?
3. Bagaimana implementasi program BUMDes Margo Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Margourip ditinjau dari ekonomi islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa strategi pengembangan BUMDes Margo Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Margourip.
2. Untuk menganalisa kendala dan solusi yang dihadapi BUMDes Margo Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Margourip.
3. Untuk menganalisa implementasi program BUMDes Margo Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Margourip ditinjau dari ekonomi islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Sebagai sumbangan penting dalam memperluas wawasan bagi kajian ekonomi syariah sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan keilmuan yang akan datang. Memberikan sumbangan penting dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Margo Jaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Ekonomi Islam.

2. Secara praktis

a. Bagi Pengelola Badan Usaha Milik Desa

Dari hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pengelola BUMDes untuk strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa Margo Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ditinjau dari Ekonomi Islam.

b. Bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan sebagai bahan referensi dan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya mengenai strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa Margo Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ditinjau dari Ekonomi Islam.

c. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang ekonomi syariah.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk penambahan wawasan dan menjadi referensi untuk mahasiswa lain yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang lebih relevan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemahaman judul skripsi diatas dan agar memahami gambaran yang jelas, maka penyusunan perlu menjelaskan istilah-istilah berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Strategi pengembangan adalah usaha menyeluruh, yang memerlukan dukungan dari pimpinan atas yang dirancang untuk meningkatkan efektifitas dan kesehatan organisasi melalui penggunaan beberapa tehnik intervensi dengan menerapkan pengetahuan yang berasal dari ilmu-ilmu perilaku.¹⁰
- b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya sebagai penyedia pelayanan sosial. Namun BUMDes juga sebagai lembaga komersial dimana BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penjualan barang atau jasa yang diperuntukan kepada masyarakat.¹¹

¹⁰ Indra Wijaya, *Perilaku Organisasi*, (Bandung: Sinar Baru, 1989),hal. 244

¹¹ Robiatul Adawiyah, *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial* (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo), *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 6, Nomor 3, September – Desember 2018

- c. Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.¹²
- d. Perspektif Ekonomi Islam yaitu Perspektif itu sendiri adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi atau juga bisa diartikan sebagai cara pandang, sedangkan Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadist.¹³

2. Secara Operasional

Penegasan secara operasional dari judul “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Margo Jaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Ekonomi Islam”, penelitian ini mengkaji lebih mendalam tentang perencanaan pengembangan Badan Usaha Milik Desa Margo Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari ekonomi islam, implementasi strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa Margo Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan evaluasi strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa Margo Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari ekonomi islam.

¹² Lincoln Arsyad, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gemapress, 1999),hal. 23

¹³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2011),hal. 17

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Bagian inti terdiri dari lima bab yaitu :

- Bab I** (Pendahuluan) yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi dan batasan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.
- Bab II** (Landasan Teori) bentuk penjabaran dalam bentuk teori. Teori dari masing-masing variable dan dari penelitian terdahulu terkait Bumdes, perekonomian dan desa, dan hasil hasil penelitian terdahulu.
- Bab III** (Metode Peneitian) yang terdiri dari oendekatan dan jenis-jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data. Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan kevalidan data temuan, dan tahap penelitian.
- Bab IV** (Hasil Penelitian) meliputi pemaparan data hasil penelitian. Tata letak desa, sejarah berdirinya desa, struktur kepengurusan desa, pengembangan badan usaha milik desa dalam perekonomian masyarakat desa ditinjau dari ekonomi islam.
- Bab V** (Pembahasan) dalam hal ini memuat tentang hasil pembahasan mengenai keterkaitan antara teori dan hasil penelitian yang telah didapat. Sehingga kejelasan akan terlihat dalam pembahasan ini.

Bab VI (Penutup) berisi kesimpulan hasil dan saran-saran yang merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan.